

# KESADARAN , ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN DAN SOSIALISASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung)

<sup>1st</sup> Naila Hairun Nisa, <sup>2nd</sup> Merliyana, SE, M.Ak

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta

Jl. Ampera II RT.008 RW.003 No. 69

Kelurahan Rawamangun, Kecamatan, Pulogadung, Jakarta Timur

Nailahairunnisa23@gmail.com, merliyana@stei.ac.id

***Abstract** - This study aims to determine the effect of taxpayer awareness, modern tax administration systems and tax socialization on individual taxpayer compliance registered at KPP Pratama Jakarta Pulogadung.*

*The numbers of samples used in this study were 100 respondents from 175.334 individual taxpayers who were registered at KPP Pratama Jakarta Pulogadung calculated based on the slovin formula with the method of determining the sample is the purposive sampling method. Data collection was carried out using a questionnaire. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis.*

*Based on the results of hypothesis testing in this study, it show that : (1) Taxpayer Awareness has a significant effect on Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama Jakarta Pulogadung, (2) The Modern Tax Administration System has a significant effect on Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama Jakarta Pulogadung, (3) Tax Socialization has a significant effect on Individual Taxpayer Compliance at KPP Pratama Jakarta Pulogadung*

***Keywords:** Taxpayer awareness, modern tax administration system, tax socialization, taxpayer compliance.*

***Abstrak**– Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pulogadung.*

*Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden dari 175.334 populasi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pulogadung dihitung berdasarkan rumus slovin dengan metode penentuan sampel adalah metode *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.*

*Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung, (2) Sistem Administrasi Perpajakan Modern berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung, (3) Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung.*

***Kata kunci :** Kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern, sosialisasi perpajakan, Kepatuhan wajib pajak*

## I. PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai sumber penerimaan guna membiayai pembangunan dalam suatu negara. Mengingat pentingnya peranan pajak sebagai sarana untuk membiayai berbagai macam pengeluaran negara, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak

Berikut ini yaitu Data jumlah wajib pajak tahun 2016 – Juli 2020 yang dirangkum dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1** Data Jumlah Wajib Pajak Tahun 2016 – Juli 2020

Tahun	Jumlah WP	Jumlah WP Bayar	Jumlah WP Efektif			Non Efektif	Jumlah SPT Laport			Rasio Kepatuhan
			PKP	non-PKP	Total		SPT PPN	SPT Non-PPN	Total	
2016	141404	9570	1231	97042	98273	43131	4860	39759	44619	53,00%
2017	148877	9599	1283	104396	105679	43198	4419	23923	28342	57,00%
2018	156987	8887	1303	102031	103334	53653	17651	72304	89955	56,00%
2019	161456	9175	1373	103309	104682	56774	13402	66659	80061	54,00%
Per Juli 2020	175334	6275			112387	62947				

Sumber : Data diolah (2020)

Berdasarkan data jumlah wajib pajak tahun 2016 – Juli 2020 cenderung meningkat, adapun rasio kepatuhan cenderung fluktuatif dengan rincian tahun 2016 rasio kepatuhan sebesar 53%, tahun 2017 rasio kepatuhan sebesar 57%, tahun 2018 rasio kepatuhan sebesar 56%, tahun 2019 rasio kepatuhan sebesar 54%. Hal tersebut menggambarkan bahwa data jumlah wajib pajak dengan jumlah wajib pajak yang bayar cenderung belum maksimal dan belum mencapai target yang diinginkan. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini terkait wajib pajak

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dan adanya *gap research* tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern dan sosialisasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, peneliti mengemukakan penelitian dengan judul **“Kesadaran , Administrasi Perpajakan Modern dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi kasus pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung)”**

### 1.1. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung?
2. Apakah sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung?

### 1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung.
2. Untuk mengetahui apakah sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung.
3. Untuk mengetahui apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung.

## II. KAJIAN LITERATUR

### 2.1. Pajak

Agoes (2016:6) mendefinisikan bahwa pajak yaitu iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut undang-undang, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah

### 2.2. Wajib Pajak

Suandy (2015:3) berpendapat bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu

### 2.3. Kepatuhan Wajib Pajak

Gunadi (2016:94) menjelaskan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Jadi semakin tinggi tingkat kebenaran menghitung dan memperhitungkan, ketepatan menyetor, serta mengisi dan memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya

### 2.4. Kesadaran Wajib Pajak

Muliari (2015:66) mengungkapkan bahwa kesadaran perpajakan merupakan kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak

### 2.5. Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Pandiangan dalam Sasmita (2019) menjelaskan bahwa administrasi perpajakan merupakan salah satu kegiatan terkait penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh setiap orang yang ada di suatu organisasi demi menjalankan hak serta kewajiban di bidang perpajakan. Jadi sistem administrasi perpajakan modern yaitu suatu program pengembangan dalam perpajakan, dalam hal ini yaitu bidang administrasi yang dilakukan oleh instansi yang bersangkutan guna memaksimalkan penerimaan pajak di suatu negara

### 2.6. Sosialisasi Perpajakan

Mustofa (2017:10) berpendapat bahwa sosialisasi merupakan suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai suatu proses dimana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif

### 2.7. Hubungan antar Variabel Penelitian

#### 2.7.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesadaran wajib pajak yaitu apabila mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan yang berlaku dan mau mematuhi, mengetahui fungsi pajak untuk menyejahterakan rakyat, menghitung, membayar, melaporkan pajak tepat waktu dan secara sukarela tanpa paksaan (Halawa dan Saragih, 2017).

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Antari dan Supadmi (2019) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan WPOP. Dan penelitian Kowel, dkk (2019) bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **2.7.2. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hutagaol, dkk (2017) bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak untuk itu diperlukan pemerintah yang *good governance* yang dapat dilakukan dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam sistem administrasi perpajakan.

Sari (2015:14) menjelaskan bahwa modernisasi perpajakan ini dapat diartikan sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi. Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Peningkatan penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dicapai dengan melakukan pembenahan dengan memberikan pelayanan yang baik pada wajib pajak tersebut. Perbaikan pelayanan lewat program perubahan, penegakkan hukum, dan pelaksanaan kode etik yang lebih baik harus diprioritaskan agar administrasi perpajakan dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta tercipta tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi (Qodariah, dkk, 2019).

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Antari dan Supadmi (2019) bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan pada kepatuhan WPOP. Jaya (2019) bahwa sistem modernisasi administrasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan pula dengan penelitian Qodariah, dkk (2019) bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama X di Jawa Barat.

### **2.7.3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Peran sosialisasi dalam konteks perpajakan sangat penting atau yang biasa disebut sosialisasi perpajakan yang merupakan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu membangun masyarakat khususnya wajib pajak yang cerdas, jujur, dan benar-benar menyadari perannya di dalam pembangunan bangsa dan negara (Rahayu, 2017:88).

Dengan demikian semakin tinggi sosialisasi perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya. Hal ini disebabkan munculnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya dikarenakan tingginya sosialisasi perpajakan yang memberikan informasi pentingnya fungsi pajak bagi masyarakat.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Qodariah, dkk (2019) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama X di Jawa Barat. Begitu pula penelitian Agustini dan Widhiyani (2019) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## **2.8. Pengembangan Hipotesis**

Berdasarkan hubungan antar variabel yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan hipotesa sebagai berikut :

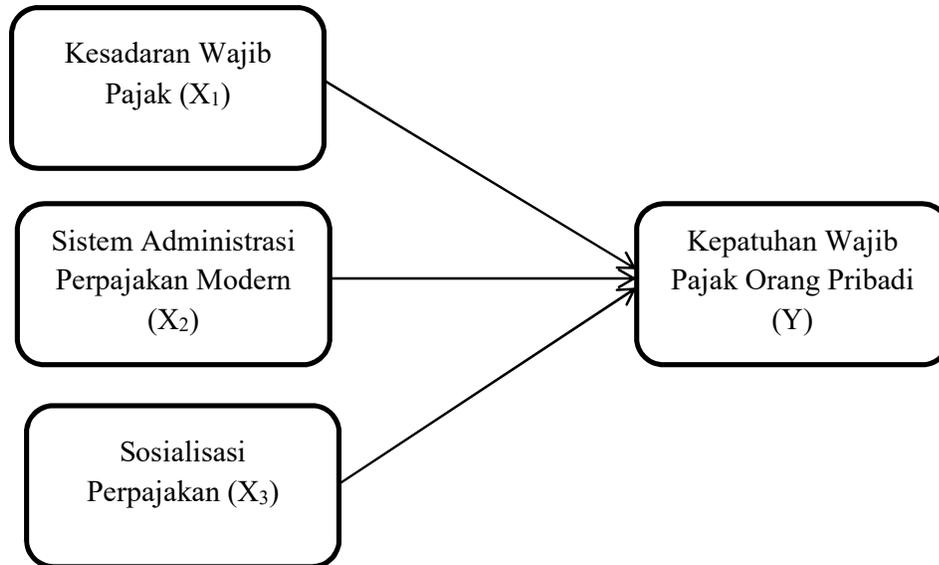
H<sub>1</sub> : Diduga bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H<sub>2</sub> : Diduga bahwa Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

H<sub>3</sub> : Diduga bahwa Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## 2.9. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan hasil paparan teori terkait, dan review hasil-hasil penelitian terdahulu, dan hubungan antar variabel yang telah dipaparkan, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

## III. METODA PENELITIAN

### 3.1. Strategi Penelitian

Creswell (2017:25) berpendapat bahwa strategi penelitian yaitu strategi dimana peneliti menggabungkan data yang ditemukan dari satu metode dengan metode lainnya, strategi ini dapat dilakukan dengan interview terlebih dahulu untuk mendapatkan data kualitatif lalu diikuti dengan data kuantitatif, dalam hal ini menggunakan survei. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena gejala-gejala hasil pengamatan dikonversikan ke dalam angka-angka yang di analisis menggunakan statistik.

### 3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi umum dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi. Adapun populasi sasaran adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung per Januari-Juli 2020 yaitu sebanyak 175.334 wajib pajak. Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel, digunakan rumus slovin (HuseinUmar, 2018:141) yakni ukuran sampel yang merupakan perbandingan dari ukuran populasi dengan presentasi kelonggaran, ketidaktelitian, karena dalam pengambilan sampel dapat ditolerir atau diinginkan. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin, sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan :

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Persen tingkat kesalahan dalam pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan e sebesar 10% dengan tingkat kebenarannya 90%.

Berdasarkan rumus diatas maka dapat diketahui banyaknya sampel yang akan digunakan digunakan dalam penelitian ini yaitu :

$$n = \frac{175.334}{1+175.334(0,1)^2} = \frac{175.334}{1+1753,34} = \frac{175.334}{1754,34} = 99,94$$

= 99,94 dibulatkan menjadi 100.

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus slovin, maka sampel penelitian ini adalah 100 orang wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Pulogadung.

### 3.3. Metode Analisis Data

#### 3.3.1. Uji Kualitas Data

##### 3.3.1.1. Uji Validitas

Menurut Ghozali (2016:52) Uji validitas digunakan untuk kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang valid. Valid berarti instrument tersebut dapat dipergunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Teknik yang dipergunakan untuk uji validitas dilakukan dengan korelasi product-moment Pearson. Jika nilai r hitung > r tabel berarti item tersebut dinyatakan valid. Sedangkan jika r hitung < r tabel berarti dinyatakan item tersebut dinyatakan tidak valid.

##### 3.3.1.2. Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2016:47) Uji reliabilitas digunakan untuk suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Reliabel menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrument cukup dengan dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data, karena instrument tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya. Teknik yang digunakan untuk uji reliabilitas adalah dengan menggunakan uji statistik Cronbach Alpha > 0,60.

#### 3.3.2 Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghozali (2016:160) Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji multikolinearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas dan normalitas.

##### 3.3.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016:105) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji f mengasumsikan bahwa nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak dapat dilihat dari hasil *Kolmogorov-Smirnov*. Dikatakan memenuhi normalitas jika nilai residual yang dihasilkan lebih besar dari 0,05.

##### 3.3.2.2 Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2016:105) Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi, dapat dilihat dari nilai *tolerance value* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance > 0,01 atau sama dengan nilai VIF < 10.

##### 3.3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot. Yang mendasari dalam pengambilan keputusan adalah :

- Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk suatu pola teratur (gelombang, melebar kemudian menyempit) maka terjadi masalah heteroskedastisitas.
- Jika ada pola jelas seperti titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:69). Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari masalah heteroskedastisitas.

### 3.3.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut SofatSilaen (2018:213) analisis regresi linier berganda digunakan apabila peneliti bertujuan untuk memprediksi perubahan variabel dependen yang dijelaskan dan dihubungkan oleh dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor yang dimanipulasi. Bentuk umum persamaan ini antara lain :

$$Y = a + \beta_1KS + \beta_2SAPM + \beta_3SP + e$$

Keterangan :

Y	= Variabel dependen (Kepatuhan wajib pajak orang pribadi)
a	= Konstanta
$\beta_1$	= Koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak
KS	= Kesadaran Wajib Pajak
$\beta_2$	= Koefisien regresi Sistem Administrasi Perpajakan Modern
SAPM	= Sistem Administrasi Perpajakan Modern
$\beta_3$	= Koefisien regresi Sosialisasi Perpajakan
SP	= Sosialisasi Perpajakan
e	= Error

### 3.3.4 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut Ghozali (2016:97) Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

### 3.3.5 Uji Hipotesis

#### 3.3.5.1 Uji t (Uji Parsial)

Menurut SyaifulBahri (2018:194) Uji t adalah uji yang digunakan untuk menguji hipotesis pengaruh variabel independen (X) secara individu terhadap variabel dependen (Y).

Formula hipotesis dalam uji t dalam penelitian ini adalah :

1. Hipotesis pertama  
 $H_0$  : Tidak terdapat pengaruh variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.  
 $H_1$  : Terdapat pengaruh variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.  
Kriteria keputusan uji t, dengan menggunakan angka probabilitas signifikan :  
Jika  $\text{sig} > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.  
Jika  $\text{sig} < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima.
2. Hipotesis kedua  
 $H_0$  : Tidak terdapat pengaruh variabel sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.  
 $H_2$  : Terdapat pengaruh variabel sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.  
Jika  $\text{sig} > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_2$  ditolak.  
Jika  $\text{sig} < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima.
3. Hipotesis ketiga  
 $H_0$  : Tidak terdapat pengaruh variabel sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.  
 $H_3$  : Terdapat pengaruh variabel sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.  
Jika  $\text{sig} > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_3$  ditolak  
Jika  $\text{sig} < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unit kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melaksanakan seluruh pelayanan perpajakan kepada masyarakat. Sebagai instansi DJP, maka KPP langsung berhubungan dengan wajib pajak. KPP sangat diandalkan oleh DJP dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak untuk menghimpun penerimaan pajak dalam wilayah kerja masing-masing. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pulogadung merupakan salah satu unsur pelaksana DJP yang mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan sederhana terhadap wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Barang Mewah, PBB, BPHTB, dan Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

##### 4.2 Deskriptif Responden

Penelitian yang dilakukan ini dikategorikan dalam penelitian survey karena data yang diperoleh menggunakan instrumen berupa kuesioner yang telah disebar. Responden dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung. Peneliti melakukan pengumpulan data selama periode Juli 2020 dengan cara menyebarkan kuesioner penelitian melalui link google form kepada para responden.

Dalam penelitian ini kuesioner yang disebar kepada responden sebanyak 117 kuesioner dengan jumlah kuesioner yang dapat diolah sebanyak 100 kuesioner yang dipaparkan sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Jumlah kuesioner yang disebar	117	100%
2	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	17	14,53%
3	Jumlah kuesioner yang dapat diolah	100	85,47%

Sumber : Data primer yang diolah peneliti (2020)

Penelitian ini didukung oleh partisipasi dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pulogadung. Berikut ini adalah karakteristik responden yang dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu menurut jenis kelamin, usia, lama menjadi wajib pajak, pendidikan terakhir, pendapatan perbulan dan pekerjaan yang akan dipaparkan sebagai berikut.

##### 4.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut ini adalah karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, yang dirangkum pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.2**

##### Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	21	21%
Perempuan	79	79%
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 4.2 bahwa wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung yang dijadikan responden adalah 100 orang, dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 21 orang wajib pajak lebih sedikit dibanding dengan jumlah wajib pajak berjenis kelamin perempuan sebanyak 79 orang. Hal tersebut menggambarkan bahwa wajib pajak dari kalangan perempuan kebanyakan rutin dalam mengurus pajak maupun membayar pajak, sehingga pada saat menyebarkan kuesioner melalui google form lebih mau membantu untuk pengisian kuesioner peneliti.

#### 4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia:

**Tabel 4.3**  
**Karakteristik responden berdasarkan usia**

Usia	Jumlah	Persentase
18 – 24 tahun	88	88%
25 – 35 tahun	10	10%
36 – 45 tahun	0	0%
> 46 tahun	2	2%
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 4.3 bahwa wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung yang dijadikan responden adalah 100 orang, untuk usia 18-24 tahun sebanyak 88 orang, usia 25-35 tahun sebanyak 10 orang dan usia > 46 tahun sebanyak 2 orang. Hal tersebut menggambarkan bahwa wajib pajak pada usia 18-24 tahun cenderung masih memiliki semangat dalam membayar pajaknya dan pada usia tersebut biasanya sudah memiliki NPWP pribadi, sehingga pada saat menyebarkan kuesioner melalui google form yang paling dominan wajib pajak yaitu berusia 18-24 tahun.

#### 4.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama menjadi Wajib Pajak

Berikut ini adalah karakteristik responden berdasarkan lama menjadi wajib pajak, yang dirangkum pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.4**  
**Karakteristik responden berdasarkan lama wajib pajak**

Lama Wajib Pajak	Jumlah	Persentase
1 – 2 tahun	43	43%
3 – 4 tahun	29	29%
>4 tahun	28	28%
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 4.4 bahwa wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung yang dijadikan responden adalah 100 orang, untuk lama wajib pajak 1-2 tahun sebanyak 43 orang, lama wajib pajak 3-4 tahun sebanyak 29 orang dan lama wajib pajak > 4 tahun sebanyak 28 orang. Hal tersebut menggambarkan bahwa lama wajib pajak pada 1-2 tahun dikarenakan wajib pajak kebanyakan dari kalangan pelajar dan mahasiswa, sehingga pada saat menyebarkan kuesioner melalui google form yang paling dominan lama wajib pajak yaitu 1-2 tahun.

#### 4.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

Berikut ini adalah karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, yang dirangkum pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.5**  
**Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir**

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMA/SMK Sederajat	65	65%
Diploma	9	9%
Sarjana	26	26%
Magister	0	0%
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data diolah (2020)

Berdasarkan Tabel 4.5 bahwa wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung yang dijadikan responden adalah 100 orang, untuk pendidikan SMA/SMK Sederajat sebanyak 65 orang, pendidikan Diploma sebanyak 9 orang dan pendidikan

Sarjana sebanyak 26 orang. Hal tersebut menggambarkan bahwa wajib pajak yang berpendidikan SMA/SMK sederajat lebih dominan dikarenakan sebagian besar responden dari kalangan pelajar yang baru lulus sekolah dan langsung mencari pekerjaan atau mahasiswa aktif kuliah yang juga sekaligus bekerja sehingga kebanyakan dari responden baru mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Sehingga pada saat penyebaran kuesioner melalui google form yang paling dominan yaitu SMA/SMK Sederajat.

#### 4.2.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Perbulan

berikut ini adalah karakteristik responden berdasarkan pendapatan perbulan, yang dirangkum pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.6**

**Karakteristik responden berdasarkan pendapatan perbulan**

Pendapatan per bulan	Jumlah	Persentase
$3 \leq 5$ juta	74	74%
$5 \leq 8$ juta	20	20%
$8 \leq 10$ juta	5	5%
$\geq 10$ juta	1	1%
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data diolah (2020)*

Berdasarkan Tabel 4.6 bahwa wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung yang dijadikan responden adalah 100 orang, untuk pendapatan perbulan  $3 \leq 5$  juta sebanyak 74 orang wajib pajak, untuk pendapatan perbulan  $5 \leq 8$  juta sebanyak 20 orang wajib pajak, untuk pendapatan perbulan  $8 \leq 10$  juta sebanyak 5 orang wajib pajak dan untuk pendapatan perbulan  $\geq 10$  juta sebanyak 1 orang wajib pajak. Hal tersebut menggambarkan bahwa wajib pajak yang memiliki pendapatan kisaran  $3 \leq 5$  juta, dikarenakan wajib pajak tersebut baru memiliki pekerjaan swasta atau memiliki usaha sampingan, yang mana umum dilakukan oleh kalangan pelajar dan mahasiswa, sehingga pada saat menyebarkan kuesioner melalui google form lebih dominan yang mempunyai pendapatan kisaran  $3 \leq 5$  juta.

#### 4.2.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

**Tabel 4.7**

**Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan**

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Pegawai swasta	83	83%
Wiraswasta	5	5%
Lainnya	12	12%
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data diolah (2020)*

Berdasarkan Tabel 4.7 bahwa wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung yang dijadikan responden adalah 100 orang, untuk pekerjaan pegawai swasta sebanyak 83 orang, wiraswasta sebanyak 5 orang dan lainnya sebanyak 12 orang. Hal tersebut menggambarkan bahwa wajib pajak yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai swasta dikarenakan responden tersebut pada pagi hari bekerja, ketika pulang di sore hari melanjutkan kuliah di perguruan tinggi masing-masing, sehingga pada saat menyebarkan kuesioner melalui google form lebih dominan sebagai pegawai swasta.

### 4.3 Hasil Uji Kualitas Data

#### 4.3.1 Hasil Uji Validitas

Penelitian yang valid adalah hasil penelitian yang memiliki kesamaan antara data terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Uji validitas data diperlukan untuk mengukur valid / tidaknya suatu daftar pertanyaan atau suatu kuesioner. Valid menunjukkan derajat ketetapan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan peneliti (Sugiyono, 2016: 109).

Pengujian validitas data ini dilakukan dengan membandingkan nilai  $r_{hitung}$  dengan nilai  $r_{tabel}$ . Untuk *degree of freedom* =  $n - 2$  dimana  $n$  adalah sampel. Dalam kasus ini dapat dihitung besarnya  $df = 100 - 2 = 98$  atau  $df = 98$  dengan nilai  $\alpha = 0,05$  didapat  $r_{tabel} = 0,1966$ .

Untuk mencari nilai validitas di sebuah item digunakan korelasi antara skor item dengan total item-item tersebut. Jika koefisiennya sama atau diatas  $r_{tabel}$  maka item tersebut dinyatakan valid tetapi jika nilai korelasinya dibawah  $r_{tabel}$  maka item tersebut dinyatakan tidak valid.

Berdasarkan data yang telah terkumpul dari 100 responden, maka terdapat 8 butir pertanyaan penelitian dari variabel kesadaran wajib pajak (X1), dan hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X1)**

No. Item	Nilai $r_{hitung}$	Nilai $r_{tabel}$	Kesimpulan
1	0,837	0,1966	Valid
2	0,827	0,1966	Valid
3	0,848	0,1966	Valid
4	0,821	0,1966	Valid
5	0,836	0,1966	Valid
6	0,841	0,1966	Valid
7	0,834	0,1966	Valid
8	0,818	0,1966	Valid

Sumber : Data diolah (2020)

Berdasarkan tabel diatas, seluruh item pertanyaan variabel kesadaran wajib pajak (X1) antara 0,818 – 0,848.maka semua item pernyataan yang terdapat pada variabel kesadaran wajib pajak dapat dinyatakan valid, karena seluruhnya mempunyai lebih besar dari pada 0,1966 ( $r_{hitung} > r_{tabel}$ ). Dengan demikian bahwa seluruh pernyataan pada variabel kesadaran wajib pajak layak untuk dilakukan uji statistik selanjutnya dikarenakan perolehan  $r_{hitung}$  yang lebih besar dari  $r_{tabel}$ .

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Validitas Sistem Administrasi Perpajakan Modern(X2)**

No. Item	Nilai $r_{hitung}$	Nilai $r_{tabel}$	Kesimpulan
1	0,796	0,1966	Valid
2	0,768	0,1966	Valid
3	0,779	0,1966	Valid
4	0,760	0,1966	Valid
5	0,808	0,1966	Valid
6	0,766	0,1966	Valid
7	0,757	0,1966	Valid
8	0,737	0,1966	Valid

Sumber : Data diolah (2020)

Berdasarkan tabel diatas, seluruh item pertanyaan variabel sistem administrasi perpajakan modern (X2) antara 0,737 – 0,808. Dengan demikian semua item pernyataan yang terdapat pada variabel sistem administrasi perpajakan modern dapat dinyatakan valid, karena seluruhnya mempunyai nilai lebih besar dari pada 0,1966 ( $r_{hitung} > r_{tabel}$ ). Dengan demikian bahwa seluruh pernyataan pada variabel sistem administrasi perpajakan modern sudah layak untuk dilakukan uji statistik selanjutnya yaitu uji reliabilitas, dikarenakan perolehan  $r_{hitung}$  yang lebih beda dari  $r_{tabel}$ .

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan (X3)**

No. Item	Nilai $r_{hitung}$	Nilai $r_{tabel}$	Kesimpulan
1	0,703	0,1966	Valid

2	0,703	0,1966	Valid
3	0,711	0,1966	Valid
4	0,731	0,1966	Valid
5	0,725	0,1966	Valid
6	0,741	0,1966	Valid
7	0,726	0,1966	Valid
8	0,735	0,1966	Valid
9	0,694	0,1966	Valid
10	0,709	0,1966	Valid
11	0,765	0,1966	Valid
12	0,710	0,1966	Valid

Sumber : Data diolah (2020)

Berdasarkan tabel diatas, seluruh item pertanyaan variabel sosialisasi perpajakan (X3) antara 0,694 – 0,765. Dengan demikian semua item pernyataan yang terdapat pada variabel sosialisasi perpajakan dapat dinyatakan valid, karena seluruhnya mempunyai nilai lebih besar dari pada 0,1966 ( $r_{hitung} > r_{tabel}$ ). Dengan demikian bahwa seluruh pernyataan pada variabel sosialisasi perpajakan sudah layak untuk dilakukan uji statistik selanjutnya yaitu uji reliabilitas.

Adapun 4 butir pertanyaan penelitian dari variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) dan hasil uji validitasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

No. Item	Nilai $r_{hitung}$	Nilai $r_{tabel}$	Kesimpulan
1	0,736	0,1966	Valid
2	0,820	0,1966	Valid
3	0,736	0,1966	Valid
4	0,819	0,1966	Valid

Sumber : Data diolah (2020)

Berdasarkan tabel diatas, seluruh item pertanyaan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) antara 0,736 – 0,820. Dengan demikian semua item pernyataan yang terdapat pada variabel kepatuhan wajib pajak dapat dinyatakan valid, karena seluruhnya mempunyai nilai lebih besar dari pada 0,1966 ( $r_{hitung} > r_{tabel}$ ). Data yang telah dikatakan valid, maka data tersebut akan memasuki uji selanjutnya yaitu reliabilitas untuk mengetahui apakah data tersebut reliable (handal) atau tidak.

#### 4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas

Menurut Ghazali (2016:45-46) reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kemudian nilai Cronbach Alpha dibandingkan dengan nilai 0,60 product moment. Jika nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60 maka instrumen dinyatakan reliable.

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Ketentuan	N Of Items	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,937	0,60	8	Reliabel
Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X2)	0,901	0,60	8	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (X3)	0,915	0,60	12	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,778	0,60	4	Reliabel

Sumber : Data diolah (2020)

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, variabel kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern, sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dapat dinyatakan reliabel, karena seluruhnya mempunyai nilai lebih besar dari pada 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini sudah handal dan setiap item pernyataan yang digunakan sebagai instrumen penelitian mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan tersebut diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

#### 4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

##### 4.4.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen keduanya memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016:154). Model regresi yang baik apabila memiliki nilai residual normal atau mendekati normal. Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui data yang normal yaitu dengan menggunakan uji one sample kolmogorov test dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Hasil dari uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Normalitas Data (one sample kolmogorov smirnov)**  
**One Sample Kolmogorov –Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,39525510
Most Extreme Differences	Absolute	,069
	Positive	,069
	Negative	-,043
Test Statistic		,069
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

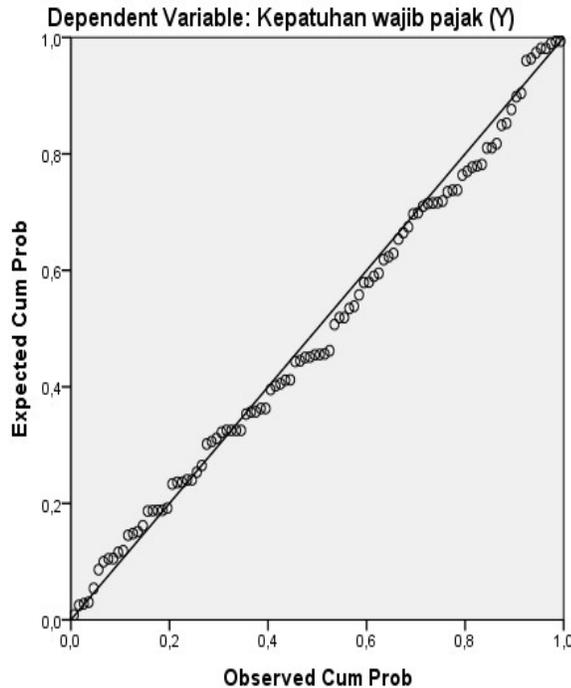
Sumber : Data diolah (2020)

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa Asymp. Sig (2-tailed) yaitu 0,200, artinya nilai Asymp. Sig lebih besar dari 0,05 ( $0,200 > 0,05$ ), hal tersebut berarti variasi data pada penelitian ini telah terdistribusi secara normal.

Dengan demikian uji normalitas dapat digambarkan dengan analisis grafik, analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan grafik normal *probability plot (scatterplot)*, dengan grafik normal *probability plot*, data dikatakan berdistribusi normal, jika data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya, sedangkan apabila data (titik) dikatakan tidak berdistribusi normal, jika data menyebar jauh dari arah garis atau tidak mengikuti diagonal atau grafik histogramnya, yang dapat dijelaskan pada gambar berikut :

**Gambar 4.1**  
**Hasil Uji Normalitas PP Plot**

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Data diolah (2020)

Berdasarkan tampilan grafik pada gambar 4.1, dapat dilihat bahwa data (titik-titik) menyebar disekitar garis diagonal (tidak terpencar jauh dari garis diagonal, maka bisa dikatakan bahwa data terdistribusi normal.

**4.4.2 Hasil Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Infiction Factor (VIF)*. Jika nilai *tolerance* < 0,10 dan *VIF* > 10, maka artinya terjadi multikolinearitas. Jika nilai *tolerance* > 0,10 dan *VIF* < 10, maka artinya tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2016:104). Hasil dari uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kesadaran wajib pajak (X1)	,376	2,656
	Sistem administrasi perpajakan modern (X2)	,249	4,014
	Sosialisasi perpajakan (X3)	,348	2,877

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak (Y)

Sumber : Data diolah (2020)

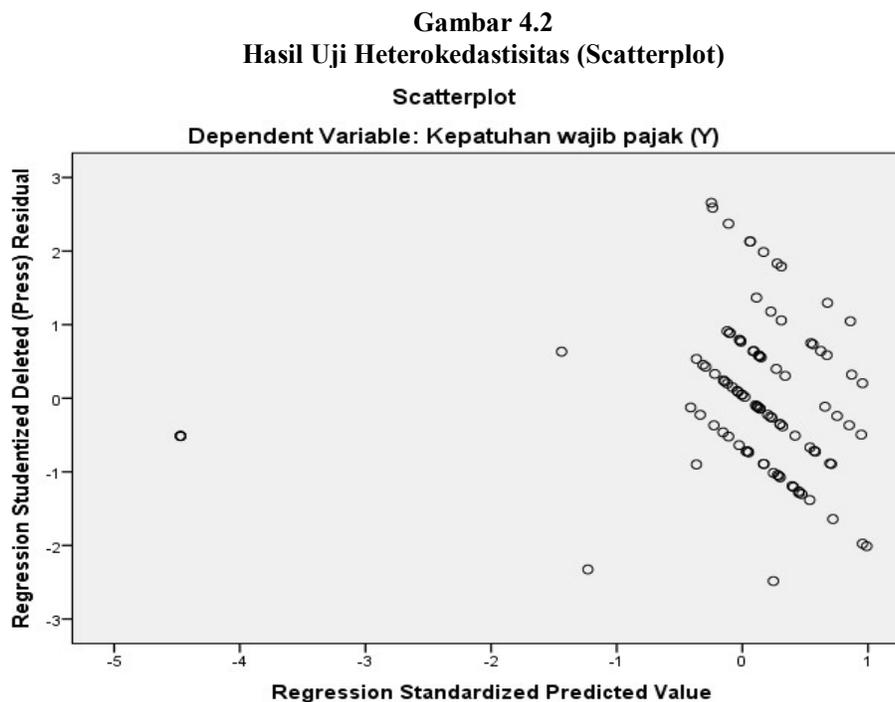
Berdasarkan tabel diatas, kesadaran wajib pajak memperoleh nilai *tolerance* 0,376 dan nilai *VIF* 2,656, sistem administrasi perpajakan modern memperoleh nilai *tolerance* 0,249 dan nilai *VIF* 4,014 dan sosialisasi perpajakan memperoleh nilai *tolerance* 0,348 dan nilai *VIF* 2,877, artinya jika nilai *tolerance* lebih besar dari angka 0,10 dan *VIF* lebih kecil dari

angka 10, maka data dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas atau tidak terjadi penyimpangan data. Dengan demikian secara keseluruhan pada variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak ada penyimpangan data, sehingga dapat dilakukan uji statistik selanjutnya.

#### 4.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016:139) bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi, jika tidak terjadi heteroskedastisitas.

Cara memprediksi heteroskedastisitas yaitu dengan melihat angka grafik scatterplot. Hasil dari uji heterokedastisitas dapat dilihat seperti gambar berikut yaitu :



Sumber : Data diolah (2020)

Kriteria pengambilan keputusan analisis dari uji heterokedastisitas sebagai berikut :

1. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada akan membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Berdasarkan gambar 4.2 diatas, terlihat bahwa titik-titik menyebar diatas angka 0 dan dibawah angka 0, artinya data dalam penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas, yang berarti data tidak terjadi penyimpangan.

#### 4.5 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui sejauh mana besarnya pengaruh antar variabel independen dengan variabel dependen. Dalam hal ini pengujian dilakukan untuk melihat pengaruh dari ketiga variabel independen (kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern dan sosialisasi perpajakan) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Hasil uji dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.15**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,124	,952		1,180	,241		
	Kesadaran wajib pajak (X1)	,141	,045	,315	3,148	,002	,376	2,656
	Sistem administrasi perpajakan modern (X2)	,179	,064	,340	2,771	,007	,249	4,014
	Sosialisasi perpajakan (X3)	,080	,039	,215	2,064	,042	,348	2,877

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak (Y)

Sumber : Data diolah (2020)

Dari perhitungan diatas, diperoleh nilai persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 KS + \beta_2 SAPM + \beta_3 SP + e$$

$$KWP = 1,124 + 0,141 KS + 0,179 SAPM + 0,080 SP + e$$

Keterangan :

a = Konstanta

KWP = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

KS = Kesadaran Wajib Pajak

SAPM = Sistem Administrasi Perpajakan Modern

SP = Sosialisasi Perpajakan

Berdasarkan persamaan regresi diatas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Koefisien konstanta sebesar 1,124 hal ini dapat diartikan bahwa jika variabel kesadaran wajib pajak (X1), sistem administrasi perpajakan modern (X2) dan sosialisasi perpajakan (X3) memiliki nilai 0 (nol) maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) nilainya adalah 1,124.
2. Koefisien regresi variabel Kesadaran wajib pajak (X1) sebesar 0,141 artinya jika variabel kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan 1 satuan dan variabel lainnya nilainya tetap, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,141. Koefisien bernilai positif, artinya Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak.
3. Koefisien regresi variabel sistem administrasi perpajakan modern (X2) sebesar 0,179 artinya jika variabel sistem administrasi perpajakan modern mengalami kenaikan 1 satuan dan variabel lainnya nilainya tetap, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,179. Koefisien bernilai positif, artinya sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, semakin tinggi sistem administrasi perpajakan modern maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak.
4. Koefisien regresi variabel sosialisasi perpajakan (X3) sebesar 0,080 artinya jika variabel sosialisasi perpajakan mengalami kenaikan 1 satuan dan variabel lainnya tetap, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,080. Koefisien bernilai positif, artinya sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib pajak orang pribadi, semakin tinggi sosialisasi perpajakan maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak.

#### 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern dan sosialisasi perpajakan dalam menerangkan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Adapun hasil uji koefisien determinasi sebagai berikut :

**Tabel 4.16**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,799 <sup>a</sup>	,639	,628	1,41689	2,389
a. Predictors: (Constant), Sosialisasi perpajakan (X3), Kesadaran wajib pajak (X1), Sistem administrasi perpajakan modern (X2)					
b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak (Y)					

Sumber : Data diolah (2020)

Berdasarkan hasil tabel 4.16 diatas, menunjukkan hasil uji koefisien determinasi Adjusted R Square sebesar 0,628 dengan kata lain hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sistem administrasi perpajakan modern dan sosialisasi perpajakan mampu menjelaskan variasi dari kepatuhan wajib pajak yaitu sebesar 62,8% sedangkan sisanya yaitu sebesar 37,2% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian.

#### 4.7 Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t atau uji parsial adalah uji koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, uji ini berguna untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap pengaruh dependen. Nilai  $t_{hitung}$  yang diperoleh dari hasil pengujian kemudian selanjutnya dibandingkan dengan  $t_{tabel}$ . Apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_a$  diterima, dan apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_a$  ditolak. Koefisien korelasi yang telah diperoleh di uji dengan menggunakan taraf signifikansi 5% (0,05). Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut ini :

**Tabel 4.17**  
**Hasil Uji Hipotesis**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1,124	,952		1,180	,241		
	Kesadaran wajib pajak (X1)	,141	,045	,315	3,148	,002	,376	2,656

Sistem administrasi perpajakan modern (X <sub>2</sub> )	,179	,064	,340	2,771	,007	,249	4,014
Sosialisasi perpajakan (X <sub>3</sub> )	,080	,039	,215	2,064	,042	,348	2,877
a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak (Y)							

Sumber : Data diolah (2020)

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan maka dapat di simpulkan bahwa :

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak (X<sub>1</sub>) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)  
Variabel kesadaran wajib pajak memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,002 yang artinya lebih kecil dari 0,05 dengan  $t_{hitung}$  sebesar 3,148 >  $t_{tabel}$  1,984 sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima, yang artinya secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung.

Hal ini menunjukkan apabila kesadaran wajib pajak tinggi, maka akan cenderung meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Antari dan Supadmi (2019) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Begitu juga diperkuat oleh penelitian Kowel, dkk (2019) bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern (X<sub>2</sub>) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)

Variabel sistem administrasi perpajakan modern memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,007 yang artinya lebih kecil dari 0,05 dengan  $t_{hitung}$  sebesar 2,771 >  $t_{tabel}$  1,984 sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka H<sub>0</sub> ditolak sehingga H<sub>2</sub> diterima, yang artinya secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung.

Hal ini menunjukkan apabila sistem administrasi perpajakan yang diterapkan baik, maka akan cenderung meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Antari dan Supadmi (2019) bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Diperkuat pula oleh penelitian Jaya (2019) menunjukkan bahwa sistem modernisasi administrasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lainnya diperkuat oleh Qodariah, dkk (2019) bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh sosialisasi perpajakan (X<sub>3</sub>) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y)  
Variabel sosialisasi perpajakan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,042 yang artinya lebih kecil dari 0,05 dengan  $t_{hitung}$  sebesar 2,064 >  $t_{tabel}$  1,984 sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka H<sub>0</sub> ditolak sehingga H<sub>3</sub> diterima, yang artinya secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agustini dan Widhiyani (2019) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## 4.8 Pembahasan

### 4.8.1 Pengaruh Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Berdasarkan hasil olahan data dengan menggunakan alat uji analisis regresi linier berganda diketahui bahwa koefisien regresi antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,141 yang artinya jika kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan 1 satuan dan variabel lainnya nilainya tetap, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami peningkatan sebesar 0,141. Berdasarkan hasil uji t atau uji parsial yang telah dilakukan, ditemukan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,148 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002. Sedangkan nilai  $t_{tabel}$  menunjukkan sebesar 1,984 jika dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  maka nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari pada nilai  $t_{tabel}$  yaitu  $3,148 > 1,984$  dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka hipotesis pertama ( $H_1$ ), diterima karena terbukti dengan penelitian yang telah dilakukan. Hasil responden kuesioner penelitian yang disebarkan oleh peneliti untuk variabel kesadaran wajib pajak, mendapatkan skor terendah yaitu terkait indikator pengetahuan perpajakan dalam “mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat”. Untuk mencapai target penerimaan pajak sangat diperlukan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dengan pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Menurut Muliari (2015:66) kesadaran perpajakan merupakan kondisi dimana seseorang mengetahui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan sangatlah diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi dan Merkusiwati (2018) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan apabila kesadaran wajib pajak tinggi, maka akan cenderung meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Begitu juga diperkuat oleh penelitian Yuliadi (2017) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### 4.8.2 Pengaruh Sistem administrasi perpajakan modern terhadap Kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil olahan data dengan menggunakan alat uji analisis regresi linier berganda diketahui bahwa koefisien regresi antara sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,179 yang artinya jika sistem administrasi perpajakan modern mengalami kenaikan 1 satuan dan variabel lainnya tetap, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami peningkatan sebesar 0,179. Berdasarkan hasil uji t atau uji parsial yang telah dilakukan, ditemukan bahwa variabel sistem administrasi perpajakan modern memperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,771 dengan nilai signifikansi sebesar 0,007. Sedangkan nilai  $t_{tabel}$  menunjukkan sebesar 1,984 jika dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  maka nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari pada nilai  $t_{tabel}$  yaitu  $2,771 > 1,984$  dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka hipotesis kedua ( $H_2$ ) diterima karena terbukti dengan penelitian yang telah dilakukan. Hasil responden kuesioner

penelitian yang disebarakan oleh peneliti untuk variabel sistem administrasi perpajakan modern, mendapatkan skor terendah yaitu terkait indikator struktur organisasi dalam “sistem pembayaran dan sistem pelaporan pajak KPP dapat diselesaikan secara cepat”. Sistem administrasi perpajakan modern sedang menunjukkan salah satu kemajuan di bidang teknologi terbaru diantaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan melalui pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu yang dikendalikan oleh *case management system* serta pelayanan dengan basis *e-system*. Dalam perjalanan sistem administrasi perpajakan yang telah ada, pemerintah berusaha untuk terus memberikan layanan yang terbaik sehingga wajib pajak mengetahui dan memahami akan kewajiban yang harus dilaksanakan. Di era globalisasi ini, teknologi sangatlah menguasai segala aspek dari keinginan dan kebutuhan manusia. Dengan bantuan teknologi yang maju, sistem administrasi perpajakan yang ada pun harus segera di modernisasikan. Dalam diterapkannya sistem administrasi perpajakan modern diharapkan dapat meningkatkan pelayanan perpajakan kepada masyarakat wajib pajak sehingga dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak (Sasmita, 2019).

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Antari dan Supadmi (2019) bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan apabila sistem administrasi perpajakan yang diterapkan baik, maka akan cenderung meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Dan didukung oleh penelitian Jaya (2019) bahwa sistem modernisasi administrasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.8.3 Pengaruh Sosialisasi perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak**

Berdasarkan hasil olahan data dengan menggunakan alat uji analisis regresi linier berganda diketahui bahwa koefisien regresi antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,080 yang artinya jika sosialisasi perpajakan mengalami kenaikan 1 satuan dan variabel lainnya nilainya tetap, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami peningkatan sebesar 0,080. Berdasarkan hasil uji t atau uji parsial yang telah dilakukan, ditemukan bahwa variabel sosialisasi perpajakan memperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,064 dengan nilai signifikansi sebesar 0,042. Sedangkan nilai  $t_{tabel}$  menunjukkan sebesar 1,984 jika dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$  maka nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari pada nilai  $t_{tabel}$  yaitu  $2,064 > 1,984$  dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka hipotesis ketiga ( $H_3$ ) diterima karena terbukti dengan penelitian yang dilakukan. Hasil responden kuesioner penelitian yang disebarakan oleh peneliti untuk variabel sosialisasi perpajakan, mendapatkan skor terendah yaitu terkait indikator kegiatan penyuluhan dalam “mengetahui bagaimana cara mengisi SPT dengan benar, membuat laporan keuangan, dan cara membayar pajak dengan benar”. Sosialisasi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan jumlah wajib pajak. Kegiatan penyuluhan pajak ini juga memiliki andil yang besar dalam menyukseskan peningkatan penerimaan perpajakan. Sebagaimana dinyatakan Direktur Jenderal Pajak bahwa menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, melebar kepada tetangga, lalu dalam forum-forum tertentu dan ormas-ormas tertentu melalui sosialisasi. Tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, dapat secara perlahan merubah pola pikir masyarakat tentang pajak ke arah yang positif (Susanto, dalam Naufal dan Setiawan, 2018). Penyuluhan dan sosialisasi pajak merupakan salah satu strategi paling penting didalam memasyarakatkan pengetahuan dan peran penting pajak Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Ginanjar (2016) bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Agustini dan Widhiyani (2019) bahwa sosialisai perpajakan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung. Berdasarkan hasil pengujian koefisien regresi untuk variabel kesadaran wajib pajak diperoleh nilai yang menunjukkan bahwa wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Pulogadung telah memiliki tingkat kesadaran yang baik dimana memahami dan menyadari tentang perpajakan serta memiliki kesungguhan untuk memenuhi kewajibannya. Dengan begitu maka akan meningkatkan penerimaan perpajakan di KPP Pratama Jakarta Pulogadung.
2. Secara parsial sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung. Berdasarkan hasil pengujian koefisien regresi untuk variabel sistem administrasi perpajakan modern diperoleh nilai yang menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern memudahkan wajib pajak untuk melakukan perpajakan. Dengan adanya sistem administrasi perpajakan modern, tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat seiring dengan kemajuan teknologi yang memanjakan wajib pajak untuk bisa melakukan perpajakan. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern pun harus diterapkan dengan baik untuk mendukung tercapainya tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak itu sendiri.
3. Secara parsial sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pulogadung. Berdasarkan hasil pengujian koefisien regresi untuk variabel sosialisasi perpajakan diperoleh nilai yang menunjukkan bahwa jika sosialisasi perpajakan dapat dijalankan dengan baik dan lebih berperan aktif dalam mensosialisasikan tentang sistem perpajakan serta pentingnya memenuhi kewajiban membayar pajak maka kepatuhan wajib pajak pun juga akan meningkat.

### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data, penulis memiliki beberapa saran yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian mendatang, yaitu :

1. Menurut hasil penelitian variabel kesadaran wajib pajak, dalam persepsi responden mendapatkan skor terendah yaitu terkait Pengetahuan Perpajakan dalam “Mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat”. Penulis memberikan saran agar pihak-pihak kantor pelayanan pajak lebih meningkatkan informasi kepada masyarakat terkait fungsi dan manfaat pajak bagi suatu masyarakat dan negara, agar dengan sendirinya masyarakat sadar bahwa pajak memiliki peran yang penting untuk kepentingan umum dalam bernegara dan bermasyarakat.
2. Menurut hasil penelitian variabel sistem administrasi perpajakan modern, dalam persepsi responden mendapatkan skor terendah yaitu terkait Struktur Organisasi dalam “Sistem pembayaran dan sistem pelaporan pajak di kantor pelayanan pajak dapat diselesaikan secara cepat”. Penulis memberikan saran struktur organisasi di kantor pelayanan pajak perlu diperhatikan khususnya yang berkaitan dengan kecepatan sistem pembayaran dan pelaporan pajak, agar sistem administrasi pajak di kantor pelayanan pajak lebih cepat dalam melayani masyarakat sebagai wajib pajak.
3. Menurut hasil penelitian variabel sosialisasi perpajakan, dalam persepsi responden mendapatkan skor terendah yaitu terkait Kegiatan Penyuluhan dalam “Mengetahui bagaimana cara mengisi SPT dengan benar, membuat laporan keuangan, dan cara membayar pajak dengan benar”. Penulis memberikan saran bahwa kegiatan penyuluhan

di kantor pelayanan pajak perlu ditingkatkan agar wajib pajak mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pengisian SPT maupun dalam hal membayar pajak dengan benar sesuai prosedur yang berlaku.

4. Untuk penelitian selanjutnya dalam variabel sistem administrasi perpajakan modern itu lebih disederhanakan dari yang peneliti buat. Untuk indikator variabelnya lebih diperjelas dalam hal penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, dan lebih di jabarkan dalam pemanfaatan teknologinya itu seperti apa, misalnya *e-registration* yang mempermudah pendaftaran NPWP, *e-SPT* dengan penyampaian SPT dengan program yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, *e-filing* dan *e-payment* yang berguna untuk melaporkan surat pemberitahuan serta pembayaran pajak secara elektronik. Dan tidak usah mencantumkan indikator variabel lainnya seperti struktur organisasi, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia dan pelaksanaan *good governance*.

### 5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini telah dilakukan dan diusahakan secara maksimal sesuai dengan prosedur ilmiah yang ada, akan tetapi pasti masih ada keterbatasan dalam penelitian ini yaitu :

1. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini hanya terdiri dari 3 (tiga) variabel yaitu Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sosialisasi Perpajakan, disisi lain masih ada banyak faktor lain yang bisa saja mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner yaitu terkadang jawaban yang diberikan oleh para responden tidak menunjukkan keadaan sesungguhnya. Adanya keterbatasan pada objek untuk melakukan penelitian ini yang hanya dilakukan di KPP Pratama Jakarta Pulogadung, sehingga tidak dapat mengetahui Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di wilayah lain

### DAFTAR REFERENSI

- Antari, Ni Luh Putu Yunika,. Supadmi, Ni Luh. 2019. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan, dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). *Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana. ISSN: 2302-8556.*
- Agustini, Komang Dewi,. Widhiyani, Ni Luh Sari. 2019. Pengaruh Penerapan E-Filling, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat. *Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana. ISSN: 2302-8556.*
- Agoes, Sukrisno. 2016. *Akuntansi Perpajakan*, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.
- Asri Fika Agusti, Viola. 2016. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama. Madura: Universitas Trunojoyo. Madura.
- Ariesta, R, P., Lyna,. Latifah. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang. *Jurnal Akuntansi Dewantara, 1 (2), 173-187.*
- Creswell, J, W. 2017. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Damayanti, Lita Dwi,. Amah, Nik. 2017. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Madiun. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan. Vol.7 No.1 Hlmn. 57-71 ISSN: 2302-6251.*
- Gunadi. 2016. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.

- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Jotopurnomo, C., Mangoting, Y. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review, Vol. 1, No. 1. Hal 51*.
- Jaya. 2019. Pengaruh Penerapan Sistem Modernisasi Administrasi Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pengetahuan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di DKI Jakarta. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Vol. 3, No. 2, Oktober 2019. Hal 255-266. ISSN: 2579-6232*.
- Kowel, Kalangi, Tangkuman. 2019. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA Vol.7 No.3 Juli 2019, ISSN 2303-1174. Universitas Sam Ratulangi Manado*.
- Kesumasari, Ni Kadek Intania, Suardana, Ketut Alit. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran dan Pengetahuan Tax Amnesty Pada Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar. *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.22.2 Februari 2018:1503-1529. ISSN: 2302-8556*.
- Lazuardini, Evi Rahmawati. 2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *E-Jurnal Riset Manajemen*.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muliari, Ni Ketut, Setiawan, Putu Ery. 2015. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis, Volume 2*.
- Mustofa, F, A., dkk. 2017. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK), Vol. 8, No.1, Universitas Brawijaya*.
- Newman. 2018. Literature Review On The Impact Of Tax Knowledge On Tax Compliance Among Small Medium Enterprises In A Developing Country. *International Journal Of Entrepreneurship. Volume 22, Issue 4, 2018*.
- Nasution. 2016. *Perpajakan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Putri, N, P., Tanno, Aries, Kurniawan, Rahmat. 2019. Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Akuntabilitas dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Benefita 4(2) Juli 2019 (386-398)*.
- Pandiangan, Liberty. 2017. *Administrasi Perpajakan*, Penerbit Erlangga.
- Qodariah, Indri Nur Alfi, Suryadi, Dedi, Yuniati. 2019. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Penyuluhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama X Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi). E-ISSN: 2621-5306*.
- Rahman, Abdul. 2018. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa.
- Rorong, E, N., Kalangi, L., Runtu, T. 2017. Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, 175-187*.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Buku 1 Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Savitri, Enni, Musfiaily. 2016. The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with Service Quality as Mediating Variable. *Procedia-Social and Behavioral Sciences 219 (2016) 682-687*.

- Suandy, Erly. 2015. *Hukum Pajak*, Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Simanjuntak, Mukhlis. 2015. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Membangun Ekonomi*. Penerbit: RAS.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Safri, Nurmantu. 2015. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Suryadi. 2016. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*, Vol. 4, 1 : 105-121.
- Suparman. 2016. “ Sistem Administrasi Perpajakan Modern” (online), (<http://pajaktaxes.blogspot.com/2007/04/sistem-administrasi-perpajakanmodern.html>, diakses tanggal 1 Juli 2020).
- Sadhmi, Djazoeli. 2015. Menuju Good Governance Melalui Modernisasi Pajak, (online), tersedia://www.bisnisindonesia.com.
- Siahaan, Marihot P. 2015. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sasmita, Sentya N. Arum. 2019. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Semarang (Studi UMKM Di Kota Semarang). *Artikel Ilmiah. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro*.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Tawas, V, B, J., Poputra, Agus T., Lambey, Robert. 2016. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi kasus pada KPP Pratama Bitung). *Jurnal EMBA Vol. 4 No. 4 Desember 2016, Hal. 912-921*.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo. 2016. *Akuntansi Pajak*. Jakarta. Penerbit : Salemba Empat.
- Widodo, Widi. 2016. *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.